

Pentingnya Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit oleh Otoritas Veteriner

PENDAHULUAN

Lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan (HPM) meningkatkan peluang tersebarnya penyakit hewan dari satu wilayah/kawasan ke wilayah/kawasan lainnya. Akan tetapi, perpindahan HPM tidak mungkin dilarang sepenuhnya. Lalu lintas HPM tetap perlu dilakukan dalam menjalankan perdagangan sektor peternakan, kebutuhan perbibitan, kebutuhan pangan bersumber hewan, kebutuhan pemilik hewan kesayangan, maupun untuk tujuan lainnya.

Sebelum adanya Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur bagaimana lalu lintas HPM dilakukan secara jelas. Akibatnya, setiap pelaku lalu lintas dibuat bingung dengan aturan dan kebijakan masing-masing daerah yang sering kali berbeda dan "tidak nyambung" dengan daerah, unit kerja, ataupun para petugas tempat lalu lintas tersebut dilewatkan.

Terbitnya Permentan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pencerahan bagi para pelaku lalu lintas dan semua pihak yang terlibat. Tentu saja, suatu kebijakan selalu muncul disertai dengan pro dan kontra. Permentan ini, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, memperkuat kewenangan pejabat otoritas veteriner (POV) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk menentukan komoditas HPM apa saja yang dapat masuk dan keluar dari wilayah mereka. Namun, hal ini dianggap oleh sebagian pihak berimbas pada kewenangan pimpinan pada organisasi perangkat daerah terkait yang sebenarnya hal ini sama sekali tidak benar. Keberadaan POV yang memastikan kesehatan HPM saat dilakukan lalu lintas sangat mendukung pada pimpinan masing-masing meneguhkan kebijakan dan keamanan bagi wilayahnya.

Bagaimana dengan para pelaku lalu lintas? Beberapa dari mereka mengatakan bahwa persyaratan teknis kesehatan hewan yang menyertai kebijakan ini lebih sulit untuk dipenuhi diakibatkan oleh ditemukannya keterbatasan keberadaan laboratorium pengujian penyakit hewan, keterbatasan

Oleh: drh Purnama Martha OS
Medik Veteriner Madya
Direktorat Kesehatan Hewan

kapasitas uji (jumlah uji) yang dapat diterima laboratorium terdekat, atau bahkan tidak tersedianya jenis pengujian yang dipersyaratkan di daerah mereka. Seringkali, laporan hasil uji juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk diperoleh dibanding perkiraan awal. Meskipun demikian, banyak juga para pelaku lalu lintas yang justru merasakan kemudahan untuk membawa HPM-nya melintas karena kejelasan syarat teknis, alur lalu lintas, serta pihak mana saja yang terkait.

APLIKASI LALU LINTAS HPM

Zaman modern tentunya butuh kemudahan! Kemajuan teknologi yang mempermudah hidup manusia juga telah diterapkan dalam implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023 ini dalam bentuk aplikasi lalu lintas HPM. Walau saat ini yang disebut sebagai aplikasi ini masih berjalan dalam browser umum, bukan pada aplikasi di *playstore*, namun berbagai *testimoni* menyatakan aplikasi ini sangat mempermudah para pelaku lalu lintas dalam mengajukan dokumen lalu lintas HPM. Para pelaku lalu lintas

dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pemasukan, rekomendasi pengeluaran, surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), sertifikat veteriner (SV), maupun pemeriksaan pengeluaran/pemasukan secara *online* tanpa harus bertatap muka dengan POV. Pada prosesnya tentu saja SKKH perlu diberikan setelah dokter hewan benar-benar datang ke tempat hewan berada guna memastikan kesehatan hewan dari tanda klinik yang dapat diamati.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Lalu lintas HPM pemohon.

Aplikasi lalu lintas HPM memudahkan juga bagi para POV untuk dapat mengakses, menelaah, dan memberikan persetujuan atas permohonan yang masuk. Dengan demikian, bisa saja pemohon dan POV berada pada kabupaten/kota/provinsi yang berbeda, namun proses permohonan dan persetujuan dapat tetap berjalan dengan lancar. Pembuatan akun di dalam aplikasi lalin HPM sangatlah mudah. Pemohon dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri dari halaman login awal aplikasi. Bagaimana dengan para POV? Nah, kalau yang ini perlu didaftarkan oleh admin dari pusat untuk memastikan bahwa hanya yang memiliki kewenangan saja yang mendapatkan akses akun sebagai POV berdasarkan surat keputusan daerah mengenai penetapan POV.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS VETERINER

Otoritas veteriner memiliki berbagai kewenangan penting dalam pelaksanaan lalu lintas HPM. Lalu lintas HPM ini sedianya merupakan pengendalian lalu lintas, agar HPM yang dilalulintaskan selalu terawasi, terdata dengan baik,

sehingga setiap kemungkinan perpindahan penyakit hewan dapat dimitigasi. Pengawasan kesehatan HPM di antaranya dilakukan dengan memastikan pengujian dan vaksinasi telah dilakukan sesuai penyakit hewan yang menjadi perhatian daerah tujuan lalu lintas. Misalnya, anjing yang melakukan perjalanan antar provinsi harus divaksin rabies terlebih dahulu. Pengendalian penyakit hewan juga didukung dengan adanya syarat pada beberapa HPM bersumber unggas, di antaranya lalu lintas unggas harus disertai dokumen SOP biosekuriti dari asalnya. Pemeriksaan produk hewan seperti daging, susu, atau telur juga telah dipersyaratkan agar memperhatikan beberapa standar kesehatan. Pemeriksaan laboratorium terkait produk hewan telah membantu memberikan kepastian yang lebih baik bahwa produk-produk ini bebas dari patogen berbahaya.



Gambar 2 Bagan alur tahapan pengajuan sertifikat veteriner dan pemeriksaan pelepasan.

PENTINGNYA PENGAWASAN

Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan oleh otoritas veteriner sangat penting dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit hewan. Penyakit hewan bisa menyebar dengan cepat melalui lalu lintas yang tidak diawasi. Penyakit seperti *Avian Influenza* (Flu Burung) yang sempat melumpuhkan peternakan unggas pada periode 2003-2005, *African Swine Fever* (ASF) yang membuat banyak peternak babi gulung tikar pada tahun 2019-2020, serta yang baru saja dilalui adanya Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) yang menyebar secara

nasional dan berdampak ekonomi pada para peternak sapi pada tahun 2022-2023 akan dapat diminimalisir dengan pengawasan lalu lintas HPM. Perlindungan ekonomi tentunya akan terbantu jika amanat dalam Pasal 16 Permentan Nomor 17 Tahun 2023 dilakukan oleh POV Kabupaten/Kota dan /atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Pelaku lalu lintas tentu saja tidak boleh lagi menolak saat POV melalui petugas pemeriksa melakukan pengawasan di tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan, atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau di pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan, atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antar provinsi dalam satu pulau atau kelompok pulau.

Setiap pengawasan dilakukan para petugas pemeriksa dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik. Keaslian dan kesesuaian antara Sertifikat Veteriner dengan surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima akan diperiksa pada pengawasan ini. Sebagai informasi tambahan, pada saat pemeriksaan kesesuaian antara jenis dan jumlah HPM dengan Sertifikat Veteriner memang boleh saja jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dokumen. Hal ini jika pada saat pemeriksaan kesehatan hewan ditemukan adanya

beberapa hewan yang sakit (bukan penyakit menular) atau produk hewan yang tidak memenuhi syarat (misal kemasan rusak) sehingga dikeluarkan dari "rombongan" yang akan dilalulintaskan. Tentu saja, ketika hewan yang diperiksa terindikasi terinfeksi penyakit hewan menular, maka penolakan untuk SV harus dilaksanakan untuk seluruh "rombongan" tersebut.

Beberapa penyakit hewan bisa yang dapat menular ke manusia (zoonosis) dapat saja terjadi akibat lalu lintas produk hewan yang terkontaminasi. Otoritas veteriner memastikan produk hewan yang dikonsumsi aman bagi kesehatan manusia. Permentan ini juga merupakan kepatuhan Indonesia terhadap regulasi internasional. Guna penjaminan lalu lintas hewan, produk hewan, serta media pembawa penyakit hewan yang aman, sehat, serta bebas penyakit hewan maka persyaratan dalam pengajuan permohonan SV harus diteliti oleh pejabat otoritas veteriner terkait, memastikan standar ini dipenuhi.

DUKUNGAN PERMENTAN NOMOR 17 TAHUN 2023

Permentan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. Peraturan ini memastikan ternak yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan yang ketat, meningkatkan kepercayaan pasar,

dan mendorong perdagangan ternak yang berkelanjutan. Regulasi ini juga mencakup prosedur disinfeksi dan perlakuan khusus terhadap media pembawa penyakit.

Berbagai syarat kesehatan hewan dan produk hewan dijelaskan secara rinci dalam regulasi ini. Misalnya, ternak yang diperdagangkan harus bebas dari penyakit menular dan produk hewan harus memenuhi standar kesehatan yang ketat. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa ternak dan produk hewan yang dilalulintaskan aman untuk dikonsumsi dan tidak menjadi media penyebaran penyakit.

KESIMPULAN

Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit oleh otoritas veteriner sesuai dengan Permentan No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 3 Tahun 2017 sangat penting dalam menjaga kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh otoritas veteriner mencegah penyebaran penyakit, melindungi ekonomi sektor peternakan, dan menjamin kesehatan masyarakat. Dukungan regulasi ini juga memastikan keberlangsungan perdagangan ternak dan perjalanan hewan kesayangan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, peran otoritas veteriner harus terus didukung dan diperkuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.